

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan meningkatnya rasa keberagaman masyarakat muslim menjalankan syariah islam dalam kehidupan sosialnya maupun ekonomi, maka perkembangan ini membuat semakin banyak institusi bisnis islami dengan menjalankan kegiatan operasional dan usahanya berlandaskan prinsip syariah saat ini. Dalam mengelola institusi islami diperlukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dijalankan harus dengan karakteristik tertentu yang sesuai dengan syariah. Pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan pada institusi bisnis islami inilah yang kemudian berkembang menjadi akuntansi syariah.

Institusi bisnis islami yang saat ini berkembang adalah perusahaan perbankan syariah yang telah mengalami peningkatan yang cukup pesat dan sudah memiliki tempat yang memberikan cukup berpengaruh dalam lingkungan perbankan saat ini terutama pada bank-bank konvensional. Pelayanan perbankan syariah yang sesuai dengan syariat islam salah satunya adalah perusahaan perbankan syariah menawarkan transaksi yang tidak berlandaskan pada konsep bunga namun perbankan syariah menjalankan sistem operasionalnya dengan memberlakukan sistem bagi hasil.

Melihat perkembangan yang cukup pesat maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang lebih besar dalam peranannya sebagai sumber

pembiayaan bagi hasil perekonomian. Masyarakat sebagai pihak yang paling berperan, pada umumnya memiliki *responds* terhadap berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh masing-masing bank untuk menarik simpati masyarakat. Simpati dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank tidak terlepas dari keadaan keuangan bank, termasuk kesehatan bank tersebut.

Menurut sebuah kajian yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Corporate Governance* merupakan salah satu faktor penentu parahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara (*The World Bank*, 1998) dalam Djalil (2011 : 3). Rendahnya tingkat penerapan *Corporate Governance* ini terkait langsung dengan tingkat *transparacy* dalam suatu lingkungan bisnis (Djalil, 2001: 3-4) Terkait dengan hal ini, Islam menawarkan sebuah aturan yang komprehensif mengenai *transparency* dan pertanggungjawaban dari sebuah entitas yang merupakan bagian tak terpisahkan dari *social community*, dimana sebuah entitas tidak hanya dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban kepada *shareholder* (pemegang saham), pemerintah, kreditor dan masyarakat saja tetapi yang lebih utama adalah adanya sebuah kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Terutama pada perusahaan perbankan yang merupakan lembaga keuangan yang menekankan pada prinsip kepercayaan (*fiduciary people*), maka dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah diperlukan adanya pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau yang lebih dikenal dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan prinsip GCG pada praktik perbankan syariah menjadi suatu keniscayaan bagi suatu institusi perbankan syariah

yang ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) terkait dengan kegiatan operasional bank syariah yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan syariah (Endri, 2010).

Institusi perbankan syariah ini tidak hanya diukur dari aspek keuangan saja melainkan harus dilengkapi dengan kinerja non keuangan seperti penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tanggal 29 Januari 2009 yang kemudian diatur juga dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/Dpbs tanggal 30 April 2010 perihal pelaksanaan GCG pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Adapun Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/Dpbs tahun 2010 yang mencangkup sebelas faktor sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
4. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
6. Penanganan benturan kepentingan
7. Penerapan fungsi audit intern
8. Penerapan fungsi kepatuhan
9. Penerapan fungsi audit ekstern

10. Batas maksimum penyaluran dana
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan intrernal

Melalui PBI ini diatur kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan *check and balance* yang harus dilakukan bank dan juga untuk menghindari *conflict of interest* dalam melaksanakan tugas. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG, bank syariah diwajibkan untuk melakukan *self assessment* secara komprehensif agar kekurangan bisa segera dideteksi. Nantinya bank akan menyerahkan laporan penerapan GCG ini kepada *stakeholders* sebagai sebuah bentuk transparansi yang dilakukan oleh manajemen (Rifka Dejalu, 2010).

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory* (Chinn, 2000; Shaw, 2003) dalam Kaihatu (2006). *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*. Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai '*agents*' bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship* model. Bertentangan dengan *stewardship theory*, *agency theory* memandang bahwa manajemen tidak dapat

dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat *respons* lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah tingkat pengembalian, risiko pembiayaan dan pengungkapan *corporate social responsibility*. Angrum Pratiwi (2013) menyatakan bahwa kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio *return on assets* (ROA) dan diperkuat oleh Bhgat, Shanjai & B. Bolton (2008) tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengembalian atas *asset* menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh positif terhadap *return on assets* (ROA).

Pada peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum menetapkan aturan tersebut ditunjukkan untuk mengurangi risiko. Penelitian Dwi Sudaryati dan Yunita Eskadewi (2012) tentang pengaruh *Corporate Governance* terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* di bank syariah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *Islamic Governance* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*.

Berdasarkan uraian diatas, maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“ANALISIS KUALITAS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN, RISIKO PEMBIAYAAN DAN PENGUNGKAPAN CSR PADA BANK UMUM SYARIAH”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* terhadap tingkat pengembalian?
2. Apakah ada pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan?
3. Apakah ada pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* terhadap tingkat pengembalian
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* terhadap risiko pembiayaan

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?

1.4 **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti di bidang perbankan khususnya mengenai kualitas penerapan *Good Corporate Governance* serta pengaruhnya terhadap tingkat pengendalian, risiko pembiayaan dan pengungkapan *corporate social responsibility* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Bagi Bank Umum Syariah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta masukan bagi Bank Umum Syariah di Indonesia dalam meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* untuk menunjang usahanya.
3. Bagi Nasabah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan penjelasan serta pengetahuan untuk mulai menggunakan jasa Bank Syariah.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian dan analisis data yang memuat analisis dari hasil penelitian dalam bentuk analisis deskriptif, analisis statistik, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan akhir, batasan penelitian dan saran.